

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor kesehatan telah berkembang pesat. Akibatnya, masyarakat dan pemerintah semakin memberikan perhatian terhadap layanan dan penyediaan kesehatan dengan tujuan mencapai kualitas layanan yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan kinerja yang lebih baik (Hammad *et al.*, 2013). Dalam sektor kesehatan khususnya entitas kesehatan, kualitas informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap entitas kesehatan tersebut (Beshi & Kaur, 2020). Hal ini dikarenakan beberapa entitas kesehatan seperti puskesmas, dan rumah sakit daerah menggunakan anggaran negara untuk mengelola serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga pemerintah memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran yang di alokasikan tersebut.

Entitas kesehatan merupakan suatu organisasi yang tujuannya tidak untuk memupuk laba sebesar-besarnya, melainkan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan untuk meningkatkan mutu pelayanannya, namun di sisi lain entitas kesehatan juga tidak dapat terlepas dari kebutuhan pembiayaan (Nordiawan, 2006). Sehingga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, entitas kesehatan melakukan berbagai macam transaksi keuangan seperti penerimaan anggaran, pendapatan jasa pasien, dan pengeluaran yang sebagian besar digunakan untuk pembelian aset, obat-obatan, serta alat kesehatan (Ardiansari, 2014; Nordiawan, 2006). Transaksi keuangan yang dilakukan ini pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan digunakan untuk keperluan internal maupun eksternal dan dijadikan ukuran dalam menilai suatu kegiatan dan kinerja entitas kesehatan.

Menurut Qomah & Ismunawan (2021), informasi keuangan yang berisikan penjelasan tentang kinerja perusahaan selama satu periode harus andal, artinya penyajiannya harus jujur dan substansial. Entitas kesehatan dapat menunjukkan akuntabilitas, dan transparansi dengan menyediakan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga dapat mengurangi kecurangan seperti tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak internal (Ardiansari, 2014; Thoa & Nhi, 2022).

Kualitas dalam informasi keuangan sangat penting karena bermanfaat dalam upaya pengambilan keputusan dan juga menentukan kebijakan untuk waktu yang akan datang. Berkualitasnya informasi keuangan dapat dilihat melalui perolehan opini laporan keuangan BPK yang diterima. Opini ini merupakan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh BPK berdasarkan kewajaran informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan berdasarkan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, masih ditemukan kualitas informasi keuangan yang buruk pada beberapa entitas kesehatan.

Pada tahun 2018 adanya penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan belanja yang terjadi di RSUD Kab. Jombang. “Pemungutan dana peningkatan kapasitas rumah sakit dari alokasi jasa pelayanan tak langsung 2018 pada RSUD Jombang tidak memiliki dasar hukum dan penggunaan dana tidak sesuai dengan semestinya. Selain itu, potongan pembayaran jasa pelayanan RSUD untuk dana kesejahteraan sosial serta pembinaan dan pengembangan pegawai belum didukung dengan mekanisme pengelolaan dana yang jelas, digunakan di luar tujuan pemanfaatan dana, dan belum diungkap dalam laporan keuangan BLUD” (IHPS BPK, 2019).

Pada tahun yang sama, terdapat rumah sakit yang menghasilkan laporan keuangan tidak sesuai dengan SAP, yaitu adanya perbedaan nilai penyertaan modal yang diakui BUMD dan dengan yang disajikan dalam LKPD dan LK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur belum disusun sesuai dengan SAP (IHPS BPK, 2018). Fenomena lainnya yaitu, Direktur Utama BPJS

Kesehatan Ghufron Mukti mengungkapkan masih ada rumah sakit yang melakukan kecurangan berupa pelaporan keuangan palsu. Hal ini membuat BPJS tetap membayarkan uang miliaran rupiah meski tidak ada pasien BPJS yang dilayani pada rumah sakit tersebut (www.jawapos.com).

Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah jaminan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah dilaksanakan dengan peruntukannya, serta bukan jaminan pula bahwa entitas yang mendapatkan opini tersebut sudah membuat anggaran yang kredibel dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan. Sehingga, sangat memungkinkan jika entitas yang memperoleh WTP masih terdapat korupsi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 1.1 terkait korupsi kesehatan.

Tabel 1.1
Data Tren Korupsi Kesehatan ICW Tahun 2010-2016

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi
2010	26
2011	26
2012	53
2013	24
2014	17
2015	2
2016	0
Jumlah	219

Sumber: antikorupsi.org/id (2017)

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) terhadap korupsi pada sektor kesehatan di Indonesia tahun 2010-2016 menemukan ada 219 kasus korupsi kesehatan. Kerugian negara dan suap dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp 890 Miliar dan Rp 1,6 Miliar dengan 519 orang tersangka yang telah ditetapkan. Rumah sakit termasuk ke dalam lima lembaga yang menjadi tempat korupsi terjadi, rumah sakit menempati peringkat kedua dengan 89 kasus korupsi, terutama korupsi pengadaan dana alat kesehatan dan obat-obatan.

Tabel 1.2
Sepuluh Objek Korupsi Kesehatan Terbesar Tahun 2010-2016

No	Objek Korupsi	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp Miliar)
1	Dana Alat Kesehatan	107	543,1
2	Dana Jaminan Kesehatan	26	62,1
3	Infrastruktur Rumah Sakit	15	47,4
4	Dana Obat-obatan	13	24,6
5	Infrastruktur Puskesmas	13	83,0
6	Sarpras Rumah Sakit	9	5,0
7	Dana Alat Kontrasepsi	7	33,5
8	Sarpras Puskesmas	6	17,8
9	Dana Operasional Rumah Sakit	4	5,6
10	Pengadaan lahan Rumah Sakit	4	1,2

Sumber: antikorupsi.org/id (2017)

Modus yang dilakukan terkait kasus korupsi tersebut salah satunya berupa penggelembungan anggaran yang menjadi modus terbanyak di sektor kesehatan yang berjumlah 93 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 512,9 Miliar, adapun penyalahgunaan anggaran dan penggelapan menjadi modus kedua terbanyak dengan masing-masing berjumlah 36 dan 33 kasus.

Menurut ICW banyaknya rumah sakit menjadi tempat korupsi karena bantuan pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan dilakukan oleh pihak rumah sakit itu sendiri. Transparansi masih rendah terutama keterbukaan atas dokumen pengadaan, kemudian adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terutama prosedur pengadaan serta kurangnya partisipasi publik. Fenomena dan alasan-alasan di atas menjelaskan mengapa sektor kesehatan harus memberikan informasi keuangan yang berkualitas (Thoa & Nhi, 2022).

Kualitas informasi keuangan bersifat multidimensi, artinya bahwa organisasi harus menggunakan beberapa langkah untuk mengevaluasi kualitas informasi. Informasi keuangan yang berkualitas penting untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi serta untuk menjaga hubungan organisasi dengan pemerintahan. Menurut Haque *et al.* (2008) sangat penting untuk perusahaan membuat informasi keuangan dan non keuangan yang mudah

diakses oleh orang luar agar orang dapat membuat keputusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan IAI (2007), terdapat empat karakteristik pokok kualitas informasi keuangan yang diperlukan agar informasi keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, adapun empat karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Meskipun laporan keuangan yang ditampilkan dan diungkapkan sesuai dengan standar dan peraturan yang ada, informasi keuangan belum tentu memiliki kualitas yang baik, karena kualitas informasi keuangan juga dipengaruhi oleh faktor infrastruktur (Fitrios, 2016). Faktor infrastruktur dalam hal ini yaitu seperti perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan komunikasi.

Pergerakan yang cepat dalam adopsi teknologi informasi oleh organisasi membantu memperoleh dan menerapkan operasi akuntansi harian menggunakan *software* akuntansi terkomputerisasi (Xu, 2020). *Software* akuntansi dirancang untuk mengelola dan mendukung operasi keuangan melalui pengumpulan, pemeliharaan, dan kontrol data untuk memfasilitasi pemrosesan informasi keuangan guna meningkatkan operasi internal dan pelaporan keuangan (Wilkinson, 2007; Olufemi, 2021). Peningkatan penggunaan *software* telah mengubah proses akuntansi, yang melibatkan entri transaksi, penyimpanan data, dan penyusunan laporan keuangan serta informasi terkait, dan berdampak pada keputusan pemangku kepentingan yang menggunakan laporan keuangan untuk berbagai tujuan (Turner *et al.*, 2020). Perubahan tersebut adalah digunakannya *software* akuntansi untuk melakukan semua tugas akuntansi alih-alih menggunakan cara akuntansi tradisional seperti pencatatan transaksi akuntansi secara manual (Kumar, 2020).

Komponen *software* dari sistem informasi akuntansi sangat penting untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas secara tepat waktu (Hurt, 2013). Thottoli *et al.*, (2019) menyatakan bahwa perangkat lunak akuntansi telah membawa peningkatan kualitas informasi keuangan entitas

sebagai hasil dari keakuratan data dan pengurangan waktu yang digunakan entitas untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan. Kebutuhan akan *software* akuntansi menjadi keharusan karena semakin kompleksnya transaksi dan operasi akuntansi organisasi, kerentanan terhadap kesalahan dan kebutuhan untuk menghasilkan laporan yang andal untuk pengambilan keputusan yang efektif (Wickramsainghe *et al.*, 2017). Oleh karena itu, ketersediaan dan berfungsinya *software* diperlukan di entitas kesehatan agar proses mengumpulkan, memproses dan menyimpan data menjadi lebih akurat, efektif, dan kualitas informasi keuangan meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan adalah ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi yang merupakan bentuk dari kemajuan teknologi akan memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, jika dilihat dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang dan yang akan datang menunjukkan bahwa teknologi semakin memiliki kemajuan atau kelebihan tersendiri (Qomah & Ismunawan, 2021). Susanto (2017) menyatakan bahwa jaringan komunikasi adalah penggunaan media elektronik untuk memindahkan informasi dan data dari satu lokasi atau beberapa lokasi ke lokasi lainnya. Dengan tersedianya infrastruktur jaringan komunikasi seperti internet di entitas kesehatan memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih berkualitas.

Software dan jaringan komunikasi adalah bagian dari komponen sistem informasi akuntansi, sehingga diperlukan pula sistem informasi akuntansi. Dengan adanya sistem informasi dalam suatu organisasi akan lebih memudahkan bagi karyawan untuk melakukan tugasnya, karena tidak lagi dilakukan secara manual dan dapat memberikan berbagai keuntungan seperti menambah efektivitas dan efisiensi (Hendarti & Gui, 2008). Penggunaan sistem informasi juga menjadi salah satu fasilitas utama organisasi untuk meningkatkan laporan keuangan yang andal dan akurat serta akses data keuangan yang lebih cepat, dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas (Gökten & Özdoğan, 2020; Hendarti & Gui, 2008)

Menurut Fitrioso (2016), kualitas informasi keuangan yang baik dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang efektif dan berkualitas. Heidmann *et al.* (2008) juga berpendapat bahwa sistem informasi akuntansi yang berkualitas diperlukan untuk menghasilkan informasi keuangan berkualitas. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sub sistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, serta informasi yang diperoleh dari pengolahan rutin transaksi akuntansi, sub sistem ini harus diintegrasikan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Rama & Jones, 2008). Sistem informasi yang berkualitas umumnya memenuhi kriteria seperti fleksibel, efisien, mudah diakses, dan tepat waktu (Stair & Reynolds, 2011).

Grande *et al.* (2011) menjelaskan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah alat yang dimasukkan ke dalam teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu pengelolaan dan pengendalian topik yang terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan perusahaan. Sebelum adanya sistem, pencatatan akuntansi dilakukan secara manual, setelah adanya sistem semua pencatatan digantikan oleh teknologi berbasis aplikasi yang diproyeksikan pada komputer (Penatari *et al.*, 2020). Sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi memungkinkan pemakai laporan keuangan dapat melihat segala informasi terkait keuangan dengan lebih cepat dan akurat (Raymond, 2020).

Di Indonesia sistem informasi akuntansi sudah banyak digunakan oleh organisasi maupun perusahaan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor kesehatan. Pada sektor kesehatan khususnya entitas kesehatan menerapkan sistem informasi akuntansi untuk mencatat, merangkum, melaporkan data ekonomi historis dan perkiraan yang berguna untuk memastikan posisi keuangan dan hasil operasionalnya dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, maupun laporan posisi keuangan (Karim, 2021). Selain itu, penerapan sistem informasi akuntansi juga dapat menambah nilai pada entitas kesehatan dengan cara mengoptimalkan pelayanan, meningkatkan efisiensi waktu pelayanan pasien, dan meningkatkan pengambilan keputusan (Eriansyah,

2020). Komputerisasi sistem informasi dalam sektor kesehatan dapat menjadi solusi untuk lebih ramah lingkungan karena rumah sakit tidak lagi menggunakan kertas, rekam medis dicatat secara elektronik dan pemeriksaan bisa dilakukan dari jarak jauh.

Keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah digunakannya aplikasi tersebut dalam suatu organisasi (Puspitawati & Wisdayanti, 2020). DeLone & McLean (1992), berpendapat bahwa digunakannya sistem informasi akuntansi dalam organisasi merupakan salah satu tolak ukur penilaian kualitas sistem informasi. Sistem informasi akuntansi tidak hanya mengintegrasikan komponen *hardware*, *software*, *brainware*, jaringan komunikasi, *database* dan prosedur, tetapi juga mencakup kualitas informasi dan kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi, karena integrasi sistem informasi akuntansi menghasilkan kualitas informasi keuangan yang akurat, tepat waktu dan konsisten bagi manajemen (McLeod & Schell, 2006; Rodin-Brown, 2008).

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada surat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, maka Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu dengan keimanan serta ilmunya. Manusia memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya, dalam surat tersebut menjelaskan bahwa ilmu adalah suatu keistimewaan yang membuat manusia unggul dibandingkan makhluk lain dan Allah menunjukkan betapa tinggi

derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Begitu juga pada pengembangan teknologi dan informasi yang merupakan ilmu yang dipelajari manusia pada kehidupan agar dapat dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thoa & Nhi (2022), menemukan adanya hubungan positif antara ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi dan *software* terhadap kualitas informasi keuangan. Al-Khasawneh *et al.*, (2019) menemukan terdapat pengaruh antara jaringan komunikasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Kemudian, Thoa & Nhi (2022), Kuraesin *et al.* (2019), Carolina (2020), Fitriati *et al.* (2020) dan Setyaningsih *et al.* (2021) menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Namun, pada penelitian Kusumawati (2021) kualitas sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Agung & Gayatri (2018) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, pada penelitian Qomah & Ismunawan (2021) menemukan hasil yang berbeda, yaitu teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, pengkajian kembali variabel-variabel pada penelitian ini didasari dengan adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian tentang kualitas informasi keuangan dengan ketersediaan dan fungsi *software* dan jaringan komunikasi di ruang lingkup entitas kesehatan belum pernah diteliti oleh peneliti di Indonesia, namun pernah dilakukan oleh peneliti di Vietnam. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Thoa & Nhi (2022) dengan judul “*Improving the quality of the financial accounting information through strengthening of the financial autonomy at public organizations*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan variabel yang digunakan. Penelitian Thoa & Nhi (2022) dilakukan pada organisasi publik dengan mayoritas sampel di bidang

pendidikan dan kesehatan yang berada di Vietnam, sedangkan penelitian ini berfokus pada entitas kesehatan yang berada di Indonesia. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian ini menambahkan kualitas sistem informasi akuntansi sebagai variabel *intervening*, karena kualitas informasi keuangan yang baik dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang berkualitas.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ketersediaan dan fungsi *software* dan jaringan komunikasi terhadap kualitas informasi keuangan pada Entitas Kesehatan, serta ditambahkan kualitas sistem informasi akuntansi sebagai variabel *intervening*. Dengan ketersediaan dan fungsi *software* dan jaringan komunikasi yang memadai maka akan menghasilkan kualitas informasi keuangan yang baik di dalam entitas kesehatan, sehingga pengambilan keputusan oleh manajemen dapat dilakukan secara tepat dan akurat dan kinerja rumah sakit menjadi baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ketersediaan dan Fungsi *Software* dan Jaringan Komunikasi Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Empiris pada Entitas Kesehatan di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Ketersediaan dan Fungsi *Software* berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan?
2. Apakah Ketersediaan dan Fungsi Jaringan Komunikasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan?
3. Apakah Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan?

4. Apakah Ketersediaan dan Fungsi *Software* berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi sebagai variabel *intervening*?
5. Apakah Ketersediaan dan Fungsi Jaringan Komunikasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi sebagai variabel *intervening*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Ketersediaan dan Fungsi *Software* terhadap Kualitas Informasi Keuangan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Ketersediaan dan Fungsi Jaringan Komunikasi terhadap Kualitas Informasi Keuangan.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Keuangan.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Ketersediaan dan Fungsi *Software* terhadap Kualitas Informasi Keuangan dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi sebagai variabel *intervening*.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris Ketersediaan dan Fungsi Jaringan Komunikasi terhadap Kualitas Informasi Keuangan dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi sebagai variabel *intervening*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai literatur akuntansi yakni pengaruh ketersediaan fungsi *software* dan jaringan komunikasi terhadap kualitas informasi keuangan pada entitas kesehatan, serta dapat memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya

dengan topik yang sama mengenai kualitas informasi keuangan yang berada di sektor publik khususnya entitas kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Entitas Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pada entitas kesehatan di kabupaten Sleman sebagai dasar atau indikator untuk mengevaluasi kualitas informasi keuangan. Serta memberikan kontribusi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dengan kualitas sistem informasi akuntansi, sehingga entitas dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai kualitas informasi keuangan pada entitas kesehatan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai pengetahuan tambahan yang lebih mendalam mengenai pengaruh pengetahuan akuntansi, ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi terhadap kualitas informasi keuangan dengan kualitas sistem informasi akuntansi sebagai variabel *intervening*.